

Pemeliharaan data pendaftaran tanah yang didasarkan pada penetapan peradilan : tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri nomor 190/PDT.6/2011/PN.JKT.SEL = Maintenance of land registration data based on judicial decision : judicial review for District Court Decision No. 190/PDT.6/2011/PN.JKT.SEL

Marcivia Rahmani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20336525&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Kepemilikan suatu subjek hukum terhadap hak atas tanah, tidak bisa mengesampingkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun bila terjadi transaksi jual-beli hak atas tanah yang tidak sesuai tetapi kemudian tetap dapat terjadi proses pengalihan hak atas tanah, maka hal itu bisa menjadi pengecualian tersendiri yang patut disertai dengan landasan yang memiliki nilai justifikasi yang pantas. Suatu Putusan Pengadilan dapat dimohonkan sebagai solusi dari proses pengalihan hak tersebut, apabila kondisi para pihak yang terkait memang berada dalam keadaan terpaksa dan tidak memiliki jalan keluar lainnya.

<hr>

ABSTRACT

Ownership of the subject on land rights law, cannot rule out the role of PPAT (official empowered to draw up land deeds) as what is specified by the UUPA (basic agrarian law). However, in the case of transaction processes of land rights that do not fit but then still be a subject of transfer of land rights, is an exception that should be accompanied with a foundation which contains a value of appropriate justification. Therefore, a court decision can be applied as a solution concerning land rights ownership transisition if the condition of the related parties meets no other alternative.